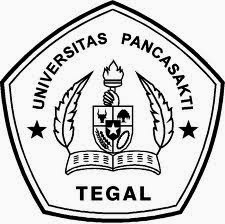
**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS HARTA ORANG TUA ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2472/PDT.G/2017/PA.CKR )**

****

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penulisan Skripsi Dan Memperoleh Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

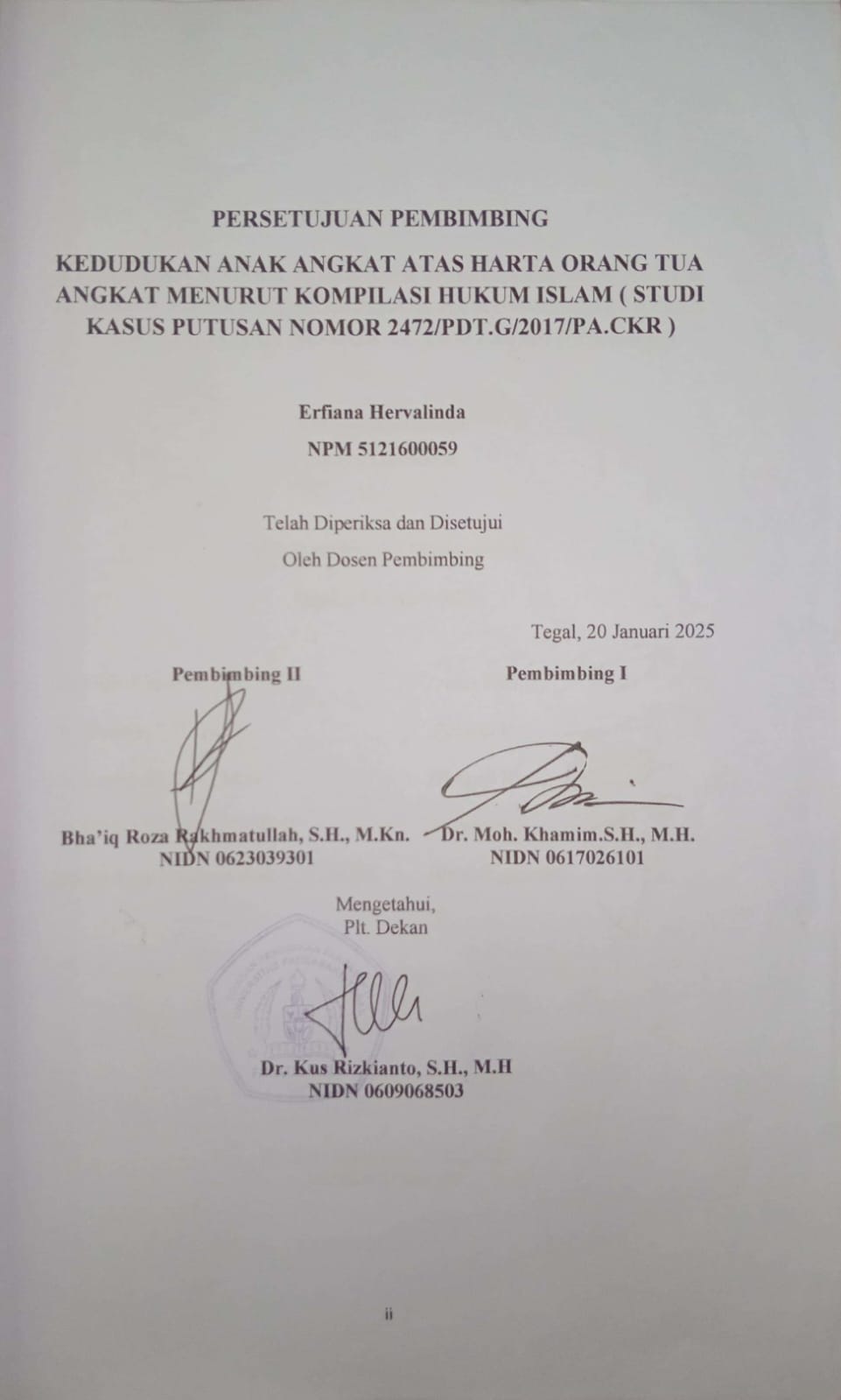
**ERFIANA HERVALINDA**

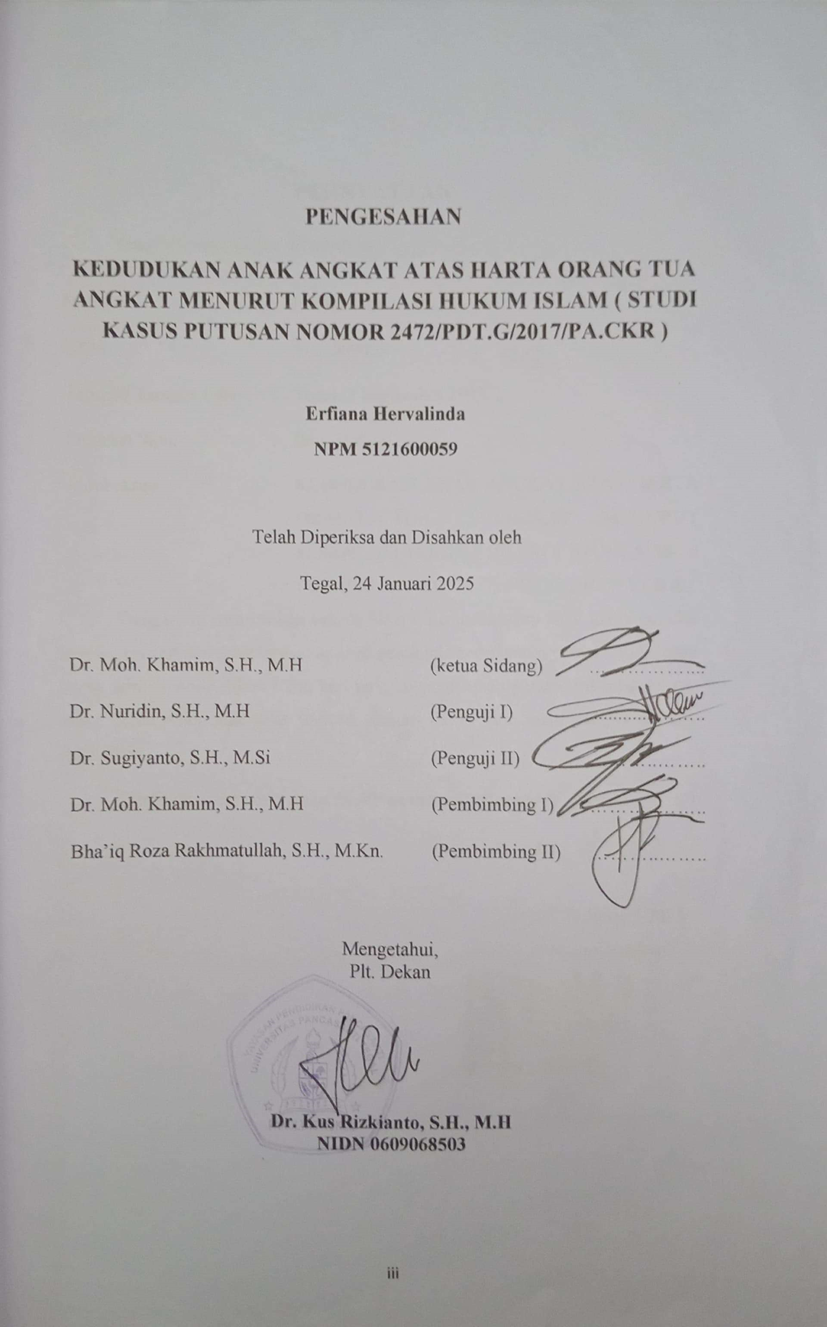
**NPM: 5121600059**

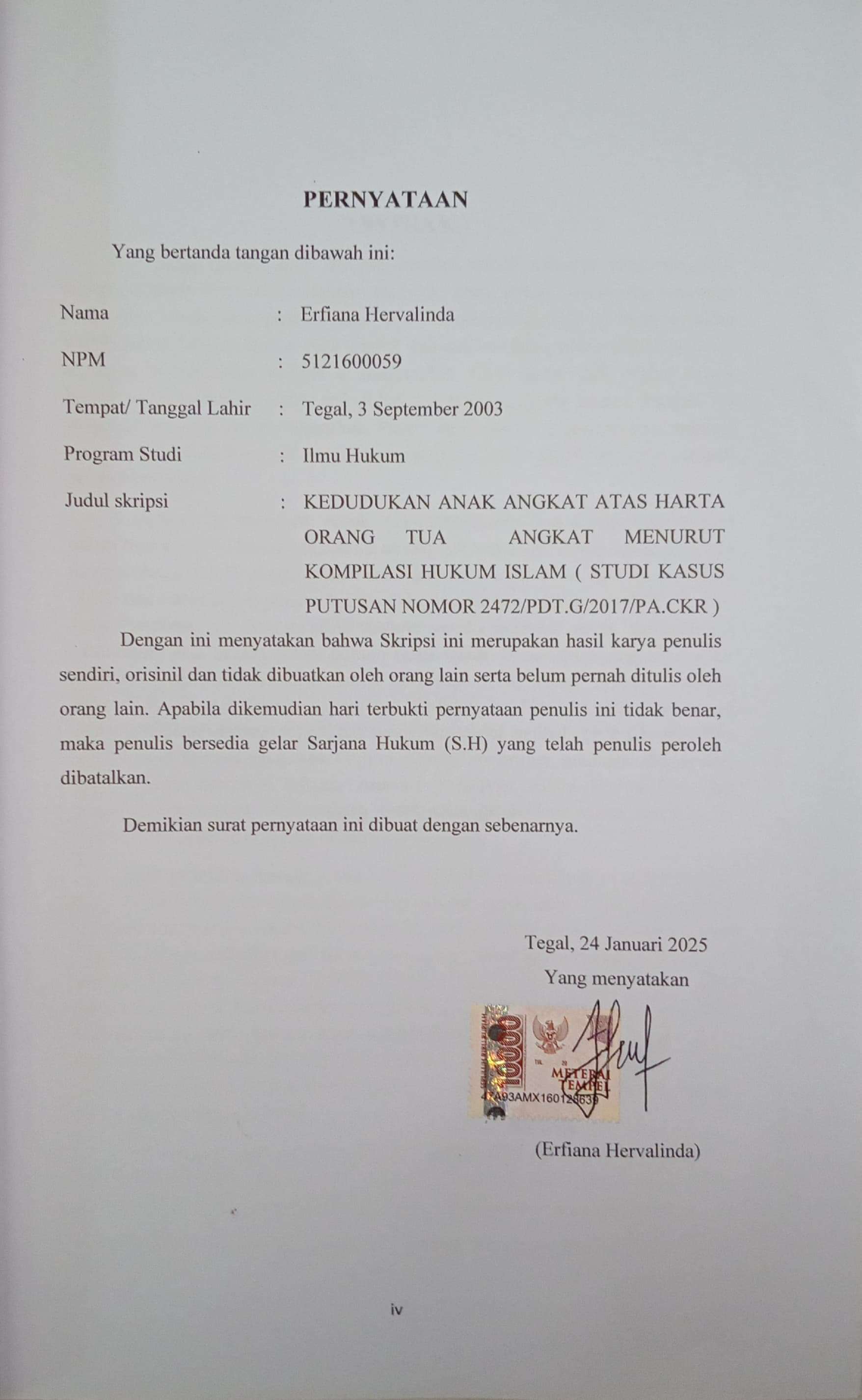
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

****

****

**Abstrak**

Pernikahan dalam Islam menjadi pondasi sakral keluarga yang mengatur hubungan antar individu. Keinginan memiliki anak sering mendorong pasangan melakukan adopsi atau pengangkatan anak, meskipun praktik ini memunculkan kompleksitas hukum. Status anak angkat dan hak warisnya kerap disalahpahami, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, khususnya terkait hak atas harta orang tua angkat, menjadi isu yang membutuhkan kajian mendalam. Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kajian terhadap putusan pengadilan terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, khususnya terkait hak waris dari orang tua angkat; (2) mengevaluasi praktik pengangkatan anak dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr. Jenis Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** untuk menganalisis kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi **perundang-undangan** untuk mengkaji KHI**, kasus** melalui Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr, dan **konseptual** untuk memahami konsep seperti hak waris dan wasiat wajibah. Data dikumpulkan melalui **studi pustaka** yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta **analisis dokumen hukum.** Analisis dilakukan secara **kualitatif** dengan deskripsi, interpretasi, dan evaluasi untuk menggambarkan aturan dan praktik hukum serta penerapan norma dalam kasus konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam bersifat kompleks dan sering menjadi perdebatan. Anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis dari orang tua angkat, tetapi dapat menerima wasiat wajibah hingga sepertiga dari harta peninggalan. Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr menekankan pentingnya pemenuhan syarat formil dalam pengajuan gugatan, serta menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum dapat menyebabkan gugatan ditolak. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak anak angkat dalam hukum Islam, serta proses yang tepat dalam pengangkatan dan pewarisan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci:** Anak angkat, hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah.

**Abstract**

*Marriage in Islam is a sacred foundation of the family that regulates relationships between individuals. The desire to have children often drives couples to adopt or adopt children, although this practice creates legal complexity. The status of adopted children and their inheritance rights are often misunderstood, causing conflict in society. The position of adopted children in Islamic inheritance law, especially regarding the rights to property of adoptive parents, is an issue that requires in-depth study. This study focuses on the analysis of regulations regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and a study of related court decisions.*

*This study aims to: (1) analyze the position of adopted children in Islamic inheritance law, especially regarding the inheritance rights of adoptive parents; (2) evaluate the practice of adoption in the context of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Decision of the Cikarang Religious Court Number 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr. This type of research uses a normative juridical method to analyze the position of adopted children in Islamic inheritance law. The approaches used include legislation to study the KHI, cases through the Cikarang Religious Court Decision Number 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr, and conceptual to understand concepts such as inheritance rights and mandatory wills. Data were collected through literature studies covering primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as analysis of legal documents. The analysis was carried out qualitatively with descriptions, interpretations, and evaluations to describe legal rules and practices and the application of norms in concrete cases.*

*The results of the study indicate that the position of adopted children in Islamic inheritance law is complex and often debated. Adopted children do not have automatic inheritance rights from adoptive parents, but can receive mandatory wills of up to one-third of the inheritance. The case study of the Cikarang Religious Court Decision Number 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr emphasizes the importance of fulfilling formal requirements in filing a lawsuit, and shows that unclear legal status can cause a lawsuit to be rejected. This study also underlines the importance of socialization and better understanding of the rights of adopted children in Islamic law, as well as the proper process in adoption and inheritance.*

*Based on the results of this study, it is expected to be a source of information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords:*** *Marriage, adopted children, Islamic inheritance law, Compilation of Islamic Law (KHI), mandatory will.*

**MOTTO**

"Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik di balik kata proses yang kamu anggap rumit"

(Edwar satria)

"orang lain tidak akan bisa faham berjuang dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian kisah sukses. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan, akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini"

"Sejujurnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS Al Insyirah: 5)

**PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahma serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Orang Tua Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr)". Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi dan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh sekaligus panutan bagi penulis.
2. Teristimewa, kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang, untuk bapak Agus Suwondo, S.H dan ibu Fori Susanti atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Semoga bapak dan ibu sehat dan bahagia selalu.
3. Saudara kandungku, Arfianto Satrio Utomo yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini.
4. Diri saya sendiri, Erfiana Hervalinda alhamdulillah telah kuat sampai detik ini, mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi serta mampu berdiri tegak dihantam permasalahan yang ada. Semoga saya tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup, tetap semangat dan pasti bisa.
5. Sahabat saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu setia menemani kegundahan maupun keceriaan hari-hariku.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Teguh Setiawan, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah, semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal.

**KATA PENGANTAR**

Dengan menyebutkan syukur kehadirat Allah Swt., Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal beserta Para Wakil Rektor.
2. Dr. Kus Riskiyanto, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Moh. Khamim, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Moh. Khamim.S.H., M.H. dan Bha’iq Roza Rakhmatullah, S.H., M.Kn yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Nuridin, S.H., M.H, dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan Strata I. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

|  |
| --- |
| Tegal, 24 Januari 2025 |
| Erfiana Hervalinda |

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACK vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

[DAFTAR ISI](#_Toc187127544) xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 7
3. [Tujuan Penelitian](#_Toc187127549) 7
4. [Urgensi Penelitian](#_Toc187127550) 7
5. [Tinjauan Pustaka](#_Toc187127551) 8
6. [Metode Penelitian](#_Toc187127552) 14
7. [Sistematika Penulisan](#_Toc187127553) 18

BAB II [TINJAUAN KONSEPTUAL](#_Toc187127555) 20

1. [Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak](#_Toc187127556) 20
2. [Pengertian Pengangkatan Anak](#_Toc187127557) 20
3. [Dasar Hukum Pengangkatan Anak](#_Toc187127558) 26
4. [Syarat-Syarat Pengangkatan Anak](#_Toc187127559) 28
5. [Tujuan Pengangkatan Anak](#_Toc187127560) 32
6. [Akibat Hukum pengangkatan Anak](#_Toc187127561) 35
7. [Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris](#_Toc187127562)  37
8. [Pengertian waris](#_Toc187127563) 37
9. [Dasar Hukum Pewarisan Islam](#_Toc187127564) 37
10. [Asas Kewarisan Dalam Hukum Islam](#_Toc187127565) 40
11. [Rukun Waris](#_Toc187127566) 41
12. [Penyebab Warisan](#_Toc187127567)  43
13. [Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat](#_Toc187127568) 45
14. [Tinjauan Umum tentang Hakim](#_Toc187127569) 48
15. [Pengertian Hakim](#_Toc187127570) 48
16. [Tugas Dan Kewenangan Hakim](#_Toc187127571)  48
17. [Pengertian Pengadilan](#_Toc187127572) 52
18. [Pengertian Putusan Pengadilan](#_Toc187127573) 56
19. [Asas Putusan Hakim](#_Toc187127574) 57
20. [Pengertian Pertimbangan Hakim](#_Toc187127575) 57
21. [Dasar Pertimbangan Hakim](#_Toc187127576) 58

BAB III [PEMBAHASAN](#_Toc187127578) 61

1. [Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Orang Tua Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)](#_Toc187127579) 61
2. [Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr](#_Toc187127583) 81

BAB IV [PENUTUP](#_Toc187127585) 89

1. [Kesimpulan](#_Toc187127586)  89
2. [Saran](#_Toc187127587) 90

DAFTAR PUSTAKA 91

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 98

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kehidupan manusia di dunia perlu membentuk keluarga yang di dasari dengan adanya pernikahan Pernikahan mencakup aspek hubungan antar manusia dan aspek kesucian sebagai wujud hubungan antara manusia dengan Tuhan.[[1]](#footnote-1) Pernikahan, yang juga dikenal sebagai nikah, merupakan perjanjian suci untuk membangun keterikatan yang sah dan bermartabat. Pernikahan didasarkan pada kesepakatan bersama serta dilakukan secara sukarela, dengan tujuan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan damai, sesuai dengan tuntunan yang diridhai Allah.

Pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, merujuk pada penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan hukum tertentu untuk membentuk ikatan yang sah. Definisi ini menekankan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, termasuk menjalankan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta melahirkan keturunan yang sah. Subekti memberikan pengertian serupa, dengan menyebut perkawinan sebagai ikatan untuk jangka waktu yang panjang, menunjukkan aspek kesetiaan dan keberlanjutan hubungan tersebut. Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Umum Islam (KHI) mengatur bahwa suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam agar dapat dianggap sah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak.

Pernikahan berfungsi sebagai lembaga yang mengatur hubungan seksual agar sah dan sesuai dengan ajaran agama. Bagi individu yang normal, perkawinan merupakan cara yang sah dan halal untuk memenuhi kebutuhan biologis, sekaligus memperoleh keturunan yang sah secara hukum. Dalam konteks hukum dan agama, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sah, tetapi juga sebagai wadah yang melindungi hak-hak kedua belah pihak, terutama dalam hal hak atas keturunan dan nafkah. Selain itu, perkawinan menjadi bentuk tanggung jawab sosial dan moral untuk melestarikan generasi yang sah dalam masyarakat.

Memiliki anak dalam suatu keluarga merupakan amanah dari Tuhan.[[2]](#footnote-2) Orang tua menginginkan anak, dan pernikahan bertujuan untuk memiliki anak, yaitu untuk memiliki keturunan. Kesejahteraan laki-laki dan perempuan pada dasarnya meningkat dengan kehadiran anak dalam keluarga. Rumah tangga yang tidak memiliki anak dapat menyebabkan ketidaksepakatan antara pasangan, yang seringkali menyebabkan perceraian.[[3]](#footnote-3) Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki keinginan untuk memiliki anak untuk membahagiakan keluarga dan melanjutkan garis keturunan. Keluarga tanpa anak biasanya mencari cara untuk menjadi orang tua, seperti mengadopsi atau membesarkan anak dari luar rumah. Anak angkat bisa berasal dari hubungan keluarga atau bisa berasal dari anak yang tidak memiliki darah daging dengan keluarga yang mengangkatnya.[[4]](#footnote-4)

Pengangkatan anak merupakan serangkaian hubungan keluarga yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, kasih sayang, dan pemahaman mendalam tentang akibat yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak tersebu, pengangkatan anak bukanlah tindakan yang dapat dilakukan dengan sembarangan seperti penyerahan barang.[[5]](#footnote-5) Sangat penting bahwa orang tua dan anak angkat memiliki etnis dan agama yang sama. Hal ini karena pandangan agama orang tua angkat biasanya diwariskan kepada cucu-cucunya. Akhlak dan akidah orang tua kandung anak bisa terpuruk jika keimanannya tidak dijaga. Di sisi lain, karena belum terlalu pahamnya organisasi hukum di Indonesia, maka permasalahan pengangkatan anak seharusnya diatasi dengan berbagai upaya hukum yang lebih lengkap.[[6]](#footnote-6)

Pengangkatan anak merupakan proses mengasuh atau mengangkat anak orang lain sebagai anaknya, baik dalam hukum adat maupun perdata. Keinginan untuk memiliki anak atau membantu anak yang ditelantarkan orang tua kandungnya agar dapat memperoleh hak-hak yang tidak diperoleh dari orang tua kandungnya merupakan penyebab umum dilakukannya adopsi anak.[[7]](#footnote-7) Pengalihan hak asuh anak adalah proses pemindahan hak asuh anak dari orang tua kandung atau wali sahnya ke rumah orang tua angkat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, yang memberikan dasar hukum bagi mereka yang ingin mengadopsi anak tanpa harus hamil. Pengangkatan anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, kemajuan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk menjamin hak tersebut. Secara filosofis, pernikahan mencerminkan harmoni hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, dengan nilai-nilai seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan pengabdian. Filosofi pengangkatan anak berakar pada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan keadilan sosial, serta mencerminkan kepedulian terhadap anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya. Praktik pernikahan dan pengangkatan anak di Indonesia dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya. Di Jawa dan Bali, pernikahan melibatkan prosesi adat dengan simbol kesucian, sementara pengangkatan anak di budaya Jawa sering dilakukan dengan pola asuh "ngemong." Di Sumatera dan Kalimantan, pengangkatan anak mempererat hubungan kekerabatan, dan di wilayah Indonesia bagian timur, pengangkatan anak menjadi tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa praktik ini dipengaruhi oleh agama, hukum, dan tradisi lokal. Secara sosiologis, pernikahan berfungsi menjaga stabilitas masyarakat, mengajarkan nilai-nilai keluarga, serta mengurangi ketimpangan sosial melalui pengangkatan anak. Keduanya memiliki dimensi sosial yang mendalam untuk menjaga keseimbangan yang adil dan manusiawi dalam masyarakat.

Pengangkatan atau pengasuhan anak orang lain memiliki tujuan, prosedur, dan akibat hukum yang beragam, yang dipengaruhi oleh kebiasaan, agama, atau pandangan hidup masyarakat setempat. Tujuan adopsi anak bisa bervariasi, mulai dari keinginan untuk menghasilkan keturunan, memastikan perawatan dan kesejahteraan anak, atau bahkan keduanya. Pengangkatan anak merupakan pilihan yang wajar dalam berbagai situasi, dengan perhatian utama pada pemberian hak hidup, kecukupan nafkah, perlindungan, dan pendidikan bagi anak yang diasuh.[[8]](#footnote-8) Beberapa alasan ini menjadi pertimbangan bagi orang yang memutuskan untuk mengadopsi.

Berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan adopsi sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan yang hati-hati agar anak angkat mendapatkan perawatan yang baik dan masa depannya terjamin. Salah satu isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah praktik adopsi dalam komunitas Muslim Indonesia. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut meyakini bahwa adopsi mengubah status hubungan antara orang tua dan anak, menghilangkan hubungan darah antara orang tua kandung dan anak angkat, kemudian mengalihkan sistem pewarisan anak angkat kepada orang tua angkat. Adopsi yang menghilangkan hubungan darah antara orang tua kandung dan anak serta menerima warisan dari orang tua angkat dilarang dalam Islam.

Pengangkatan anak sering kali disalahpahami oleh banyak orang, baik terkait dengan prosedur hukum yang sah, langkah-langkah yang harus diambil, akibat hukum yang muncul, maupun posisi anak angkat dalam perspektif hukum. Ketidaktahuan ini sering menyebabkan perselisihan dalam keluarga, khususnya terkait dengan status dan posisi anak angkat, serta dampaknya terhadap pembagian harta warisan. Skripsi yang akan di teliti dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Orang Tua Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr)” akan membahas permasalahan tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr menjadi salah satu contoh sengketa waris yang melibatkan anak angkat, yang menunjukkan betapa pentingnya memahami konsep adopsi dalam Islam, terutama dalam konteks hukum waris. Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr ini menunjukkan bagaimana putusan tersebut menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pemanggilan waris dan pembatalan hibah.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana kedudukan anak angkat atas harta orang tua angkat berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr ?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisis kedudukan anak angkat atas harta orang tua angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6. Untuk **mengkaji** pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr.
7. **Urgensi Penelitian**

Penelitian yang di lakukan ditujukan untuk dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini meningkatkan Pengetahuan kita tentang status anak angkat menurut hukum Islam menjadi lebih baik melalui penelitian ini, khususnya terkait dengan aturan-aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hukum Islam, temuan-temuan ini seharusnya memperjelas hak-hak anak angkat untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya, seperti yang diatur dalam pasal-pasal mengenai wasiat wajibah dan pembagian harta warisan. Penelitian ini juga memberikan analisis mendalam tentang penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hibah, khususnya dalam putusan pengadilan. Diharapkan penelitian ini dapat menghilangkan kesalahpahaman yang umum terjadi di masyarakat mengenai hak milik anak angkat dari orang tua angkatnya. Menemukan dan menganalisis sengketa dalam hukum waris yang timbul dari perspektif Islam tentang hak anak angkat untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya juga merupakan bagian penting dari penelitian ini.

1. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan perselisihan waris yang sering muncul antara anak angkat dan ahli waris lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan waris dan anak angkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tentang hak dan tanggung jawab anak angkat dalam hal memperoleh harta dari orang tua angkatnya.

1. **Tinjauan Pustaka**

**Penelusuran penelitian terdahulu** dilakukan untuk menghindari duplikasi serta menjamin kepastian dan keabsahan penelitian ini. Penelusuran ini juga bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan objek kajian penting dari penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. Artikel Miftahul Aini yang diterbitkan pada tahun 2020 dalam Jurnal Notary Indonesia dengan judul "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata". Penelitian ini di Indonesia membahas pembagian hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat dari sudut pandang hukum perdata dan hukum Islam. Persamaan utama antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada cara hukum Islam membagi harta orang tua angkat kepada anak angkat, termasuk wasiat wajib. Tetapi perbedaan terletak pada apa yang dibicarakan. Penelitian Miftahul Aini lebih berfokus pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata tentang pembagian harta orang tua angkat kepada anak angkat. Sebaliknya, penelitian penulis lebih berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penerapan hukum dalam konteks pengadilan agama. Penelitian ini juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum Islam diterapkan dalam pengadilan agama.[[9]](#footnote-9)
2. Studi 2017 Mukhtar Asrori di Jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) memberikan penjelasan mendalam tentang hukum Islam tentang pembagian warisan dan wasiat wajib. Fokus penelitian ini adalah hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang dilakukan penulis. Studi Mukhtar Asrori berfokus pada cara masyarakat secara keseluruhan membagikan warisan dengan wasiat wajibah, khususnya di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Sementara itu, penelitian penulis berkonsentrasi pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr, yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini menekankan penggunaan hukum dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana keputusan hakim dipandang dari sudut pandang hukum Islam terkait masalah hukum terkait hak waris anak angkat.[[10]](#footnote-10)
3. Penelitian 2013 oleh Angga Pradipta dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul "Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat bagi Anak Angkat Ditinjau dalam Hukum Perdata" membahas bagaimana hak waris anak angkat dibagi berdasarkan wasiat orang tua angkat dari sudut pandang hukum perdata. Penulis melakukan penelitian yang berbeda. Penelitian Angga Pradipta lebih berfokus pada bagaimana wasiat wajibah dalam hukum perdata membagi harta kepada anak angkat. Sebaliknya, penelitian penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam penyerahan harta kepada anak angkat, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian penulis juga membahas bagaimana hukum Islam diterapkan dalam sistem peradilan agama Indonesia, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus.[[11]](#footnote-11)

**Tabel 1.1**

**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAMA, JUDUL,**  **DAN TAHUN** | **HASIL PENELITIAN** | **PERSAMAAN** | **PERBEDAAN** |
| Artikel berjudul "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 Dan Nomor 35/Pdt.G/2018/ PTA.Plg" diterbitkan dalam jurnal Miftahul Aini pada tahun 2020. | Studi ini menganalisis pembagian hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat dari sudut pandang hukum perdata dan Islam. Studi ini juga menjelaskan wasiat wajib yang diatur dalam kedua hukum perdata dan Islam. | Fokus pada cara orang tua angkat dan anak angkat membagi harta warisan, , serta bagaimana hal itu berkaitan dengan hukum Islam. Dibahas juga wasiat wajib dalam konteks hukum perdata dan Islam. | Penelitian Miftahul Aini lebih fokus pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata, sedangkan penelitian penulis adalah analisis pertimbangan hakim tentang Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr dan pelaksanaan hukum Islam. |
| Mukhtar Asrori menyelesaikan tesisnya pada tahun 2017. Tesis tersebut berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus Di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)." | Studi ini berfokus pada wasiat wajibah, yang berfungsi sebagai dasar untuk pembagian harta anak angkat, dan membahas pembagian waris anak angkat menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian ini memperhatikan bagaimana wasiat wajibah diterapkan di tingkat masyarakat. | fokus pada pembagian waris anak angkat yang didasarkan pada hukum Islam dan wasiat wajibah, serta bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam praktik hukum. | Penelitian Mukhtar Asrori berkonsentrasi pada praktik di tingkat masyarakat, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). |
| Skripsi Angga Pradipta berjudul "Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata" diselesaikan pada tahun 2013. | Studi ini membahas hukum perdata, khususnya bagaimana hukum Indonesia mengatur pembagian waris anak angkat, dengan penekanan khusus pada wasiat orang tua angkat yang diberikan kepada anak angkat. | Fokus pada pembagian warisan berdasarkan wasiat orang tua angkat yang disahkan dalam hukum perdata, mempertimbangkan hak-hak anak angkat dalam konteks hukum perdata. | Studi Angga Pradipta berfokus pada hukum perdata. Penelitian penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr, yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bagaimana hukum Islam diterapkan. |

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *yuridis normatif*, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan saat ini serta *doktrin* dan asas ilmu hukum. Penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, yang mengkaji hukum tertulis seperti yang diputuskan oleh hakim dalam proses peradilan. Penelitian ini melibatkan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dengan memeriksa literatur, buku-buku, catatan, dan laporan tentang topik yang dibahas. Karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan yang lebih mengutamakan analisis teks atau wacana yang ada.[[12]](#footnote-12)

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *yuridis-normatif* digunakan karena bahan yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari standar atau prinsip, ketentuan atau peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.[[13]](#footnote-13) Pendekatan *yuridis-normatif* berfokus pada bagaimana prinsip atau norma hukum positif diterapkan. Ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang *(Statute approach),* pendekatan konseptual *(Conceptual approach),* *(Case approach).*

1. Pendekatan Undang-undang *(Statute Approach)*: Pendekatan ini mencakup analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut mengatur isu hukum yang sedang diteliti, yaitu kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta dari orang tua angkatnya. Analisis ini akan dilakukan dengan meneliti teks hukum, struktur, dan hubungan antar pasal dalam *KHI dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
2. Pendekatan konseptual *(Conceptual approach):* Pendekatan ini melibatkan meninjau konsep hukum Islam seperti hibah dan anak angkat. Tujuannya adalah untuk memahami makna dan implikasi konsep-konsep tersebut dalam menentukan kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Analisis ini akan dilakukan dengan menelusuri literatur hukum Islam yang membahas konsep-konsep tersebut.
3. pendekatan kasus *(Case approach):* Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap *Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr.* Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang telah dianalisis dalam pendekatan perundang-undangan dan konseptual diterapkan dalam kasus konkret. Analisis ini akan dilakukan dengan meneliti pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.
4. Data Penelitian

Sumber-sumber dalam penelitian hukum meliputi Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber penelitian hukum:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer termasuk peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan keputusan pengadilan. Konstitusi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr. adalah beberapa undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Skunder

Data sekunder adalah bahan hukum utama yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian tentang masalah yang dibahas.

1. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan arahan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini disebut sebagai bahan tersier.

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau dokumentasi. Pengumpulan data difokuskan pada data sekunder, dan peneliti menggunakan studi pustaka untuk mencakup teori serta referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi.

1. Metode Analisis Data

Penelitian yang dikenal sebagai analisis data kualitatif menghasilkan data deskriptif dari ungkapan tertulis atau lisan tentang tingkah laku manusia yang diamati.[[14]](#footnote-14) Peraturan perundang-undangan, literatur tentang pertimbangan putusan hakim, dan sumber lain digunakan untuk melakukan analisis data. Dari bahan yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang ditetapkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Selanjutnya, semua data akan dipilih, diolah, dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti.

## **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi:

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | Pendahuluan. Bab ini mencakup pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan dibahas dalam bab ini. |
| BAB II | Bab tinjauan pustaka ini membahas teori terkait permasalahan penelitian, termasuk pengertian anak angkat, dasar hukum pengangkatan, tujuan, syarat, dan akibat hukumnya. Bagian waris menguraikan pengertian, dasar hukum, rukun, asas, penyebab kewarisan, serta wasiat wajibah yang berkaitan dengan anak angkat. Selain itu, akan dibahas pengertian hakim, tugas, kewenangan, proses pengambilan keputusan, dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. |
| BAB III | Hasil Penelitian dan Diskusi Bab ini akan membahas kedudukan anak angkat atas harta orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bersama dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/Pa.Ckr. |
| BAB IV | Penutup. Terdiri atas kesimpulan & saran. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti. |

# 

# **BAB II**

# **TINJAUAN KONSEPTUAL**

## **Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak**

### **Pengertian Pengangkatan Anak**

Anak merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi negara dan bangsa, yang perlu dilindungi agar dapat tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi positif kepada negara serta masyarakat di masa depan. Anak-anak memerlukan perlindungan, perawatan, dan dukungan, terutama jika mereka menghadapi ketergantungan fisik, mental, atau intelektual, menderita cacat, atau belum mencapai kedewasaan. Orang tua, keluarga, komunitas, bangsa, dan negara memiliki kewajiban, baik secara agama maupun kemanusiaan, untuk merawat, membesarkan, dan mendidik anak-anak. Perhatian terhadap anak harus disesuaikan dengan perkembangan peradaban yang terus berubah. Anak merupakan cerminan kehidupan dan harapan masa depan bangsa. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dukungan serta pembinaan khusus agar dapat berkembang dengan baik, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual.[[15]](#footnote-15)

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan anak-anak dengan nilai dan martabat kemanusiaan yang sama sebagai anugerah sekaligus tanggung jawab. Mereka berhak memperoleh perkembangan fisik, mental, dan sosial sebaik mungkin serta pendidikan yang mereka butuhkan untuk menjadi manusia bermoral. Sebagai penerus generasi keluarga, bangsa, dan negara, anak memegang peranan penting di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi agar mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka.[[16]](#footnote-16)

Anak-anak memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang sangat berguna di masa depan, dan generasi mendatang akan meneruskan nilai-nilai perjuangan negara dan menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perkembangan terbaik di semua aspek kehidupan mereka fisik, mental, dan sosial. Memiliki anak sering dianggap sebagai prioritas utama bagi pasangan yang menikah. Anak bukan hanya merupakan representasi dari kontinuitas keluarga, tetapi juga merupakan pengikat emosional bagi pasangan. Keluarga yang tidak memiliki keturunan dapat menghadapi masalah tertentu untuk bertahan hidup. Adopsi adalah pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh pasangan yang telah lama menikah tetapi belum memiliki anak.[[17]](#footnote-17)

Seorang anak disebut anak ketika mereka diambil dari pengasuhan orang tua, wali, atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan perawatan mereka dan ditempatkan dalam lingkungan keluarga sah orang lain. Sepasang suami istri mengadopsi anak dari keluarga lain dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan hak-hak dasar yang sama seperti anak-anak lainnya. Menurut hukum adat setempat, anak-anak harus ditempatkan untuk melestarikan warisan keluarga orang tua angkat dan melindungi aset mereka.

Berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pengangkatan anak secara terminologi:

1. B. Bastian Taffal, S.H., dalam bukunya *Common Law Adopsi dan Akibat Hukumnya di Masa Depan,* pengangkatan anak adalah upaya untuk mengasuh dan memperlakukan anak yang bukan keturunan sebagai anak sendiri, dengan tujuan mengambil alih tanggung jawab pengasuhan dan memberikan hak-hak yang setara dengan anak kandung.[[18]](#footnote-18)
2. Muderis Zaini menjelaskan bahwa pengangkatan anak sebagai proses menyatukan seorang anak dengan orang yang berasal dari keluarga lain, di mana dia diperlakukan seperti anak kandung dalam hal kasih sayang, dukungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Status anak angkat mereka tidak memengaruhi perlakuan yang mereka terima; itu sama dengan anak-anak lainnya. Ini mencakup hubungan emosional yang berkelanjutan dan tanggung jawab orang tua angkat, tanpa mempertimbangkan latar belakang keturunan anak.[[19]](#footnote-19)

Makna adopsi lebih berfokus pada memenuhi kepentingan terbaik anak, untuk memberikan bimbingan pengasuhan dengan harapan dapat membantu anak menjadi mandiri di masa depan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Orang tua angkat juga mempunyai keinginan dalam hatinya untuk merawat anak angkatnya ketika sakit dan mendoakannya ketika meninggal.[[20]](#footnote-20) Dalam lembaga pengangkatan anak, aturan yang jelas harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang optimal untuk berkembang secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijtihad, hukum Islam di Indonesia mengatur pengangkatan anak. Pola ini terlihat dalam banyak karya filsafat hukum Islam, seperti putusan pengadilan, fiqih, dan fatwa, serta Kompilasi Hukum Islam. Anak yang tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan suatu penetapan pengadilan, juga dianggap sebagai anak angkat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.[[21]](#footnote-21)

Bagian tersebut secara halus mengungkapkan bahwa ketika seorang anak ditandatangani, orang tua asli melepaskan semua tugas kepada orang tua angkat, termasuk biaya hidup, sekolah, dan kewajiban lainnya. Meskipun demikian, perwalian dalam perkawinan anak angkat, dan hak waris orang tua kandung tetap dipertahankan dan dijaga.[[22]](#footnote-22) Dalam kebanyakan kasus, anak angkat memiliki status hukum sebagai anak kandung yang sah, dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan orang tua angkatnya.

Pengertian pengangkatan anak yang dibedakan dalam kitab Al-Fatwa Mahmud Shaltut:[[23]](#footnote-23)

1. ***Tashri'i,* atau adopsi yang sah: Dalam sistem hukum di berbagai negara, hal ini mengacu pada adopsi seorang anak yang diatur dan diakui secara formal oleh hukum.**
2. **Pengangkatan Anak Secara Syariah *(Syar'i)*: Menurut hukum Islam, pengangkatan anak jenis ini lebih menitikberatkan pada proses membesarkan dan mengasuh anak yang diambil oleh seseorang tanpa secara tegas mengubah status hukum anak tersebut.**

Penafsiran pertama ini sesuai dengan pemikiran dalam hukum Islam meskipun tindakan mengangkat anak memiliki tujuan untuk memberikan perhatian, perawatan, pendidikan, dan segala kebutuhannya, namun anak angkat tidak dianggap sebagai anak menurut garis keturunannya sendiri. Anak angkat tidak dianggap sebagai keturunan kandung menurut hukum Islam, dan tidak ada klausul yang membenarkan pengangkatan anak dan mengubah status kelahirannya.

Dalam hukum perdata Barat, pengangkatan anak dianggap sebagai berakhirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua kandung dan anak yang diangkat oleh orang lain, dan anak angkat dianggap sebagai keturunan sah dari ayah angkatnya. Penafsiran kedua ini sebanding dengan hal ini. Dalam hukum Islam, gagasan ini disebut tabani, atau penunjukan mutlak. Hukum Islam melarang adopsi tunggal semacam ini karena mencegah terputusnya ikatan biologis antara anak angkat dan orang tua kandungnya.[[24]](#footnote-24)

Beberapa asas hukum terkait pengangkatan anak dalam hukum islam sebagai berikut:

1. Hukum Islam tidak melarang adopsi anak, bahkan dianjurkan (*mubah*), terutama untuk mengadopsi anak yang terlantar untuk mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang. Tujuannya adalah agar anak-anak ini bisa membantu masyarakat Islam di masa depan.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan keluarga dan darah anak angkat. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama belakang orang tua angkatnya karena mereka tidak memiliki hubungan darah. Akibatnya, ayah kandung anak angkat adalah wali perkawinan, dan orang tua angkat tidak memiliki hak untuk mewariskan harta orang tua kandung anak angkat.
3. Sangat penting bagi penganut agama Islam untuk menjaga, mendidik, dan mendidik anak-anak yang terlantar yang orang tuanya tidak jelas. Anak-anak ini harus diperlakukan secara agama dan spiritual seperti saudara. Salah satu kewajiban sosial umat Islam adalah mencegah anak-anak terlantar.[[25]](#footnote-25)

Pengadilan menetapkan bahwa anak angkat dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya. Membantu dan meringankan beban orang tua kandung adalah salah satu tujuan transportasi anak. Situasi di mana suatu perkawinan tidak dikaruniai anak sering kali membuat pengangkatan anak menjadi langkah yang diambil untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Beberapa pasangan memilih mengadopsi anak agar memiliki keturunan dalam keluarga. Situasi ini dapat memengaruhi pembagian warisan dari orang tua angkat serta hubungan warisan lainnya. Oleh karena itu, strategi tertentu perlu diterapkan guna mempertahankan aset keluarga dari waktu ke waktu, sambil tetap mempertimbangkan alasan awal pengangkatan anak tersebut.[[26]](#footnote-26)

1. **Dasar Hukum Pengangkatan Anak**

Beberapa ayat Al-Qur’an sering digunakan sebagai landasan hukum pengangkatan anak dalam pandangan islam, antara lain:

1. Ayat ini menegaskan pentingnya memanggil anak angkat dengan nama ayah kandungnya, sebagaimana disebut dalam Surat Al-Ahzab (33): 4 yang artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."
2. Dan juga Surat Al-Ahzab (33): 5 yang artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."
3. Dalam Surat Al-Ahzab (33): 37 yang artinya: *"Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi."*

### **Syarat-Syarat Pengangkatan Anak**

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak baru dianggap legal jika memenuhi syarat-syarat berikut: [[27]](#footnote-27)

1. Anak angkat tidak boleh memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya atau keluarganya. Anak angkat juga tidak boleh memiliki saudara kandung, sepupu, atau kerabat dekat lainnya dengan orang tua angkatnya.
2. Tidak menjadi ahli waris: Anak angkat tidak memiliki status ahli waris orang tua angkatnya, begitu pula orang tua angkatnya tidak menjadi ahli waris anak angkatnya. Artinya, anak angkat tidak berhak mewariskan harta orang tua angkatnya atau sebaliknya.
3. Tidak menggunakan nama orang tua angkat: Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali untuk tujuan identifikasi atau alamat. Anak angkat tidak boleh mengklaim dirinya sebagai anak kandung orang tua angkatnya.
4. Agama: Anak angkat harus beragama Islam, jika tidak ada jaminan bahwa anak tersebut dapat masuk Islam. Hal ini penting untuk menjaga keislaman anak angkat dan memastikan mereka menerima pendidikan agama yang sesuai.
5. Tujuan: Tujuan utama pengangkatan anak dalam islam adalah untuk membesarkan, mendidik, merawat, dan memberikan perhatian pada anak-anak yang terlantar atau yang tidak mendapat nafkah yang cukup. Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan untuk melanggengkan keturunan atau memperoleh keuntungan materi.
6. Persetujuan: Jika orang tua kandung anak angkat diketahui, persetujuan mereka sangat penting. Jika tidak, persetujuan pihak yang berwenang, seperti lembaga sosial atau pengadilan, juga diperlukan.
7. Prosedur: Persetujuan orang tua kandung anak angkat, apabila diketahui, sangat penting. Jika orang tua kandung tidak diketahui, maka diperlukan persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti lembaga sosial atau pengadilan.
8. Menyelamatkan anak dari keterlantaran: Anak yang terlantar, yatim piatu, atau yang ditinggalkan orang tuanya sangat rentan terhadap berbagai kesulitan. Pengangkatan anak memberikan mereka tempat berlindung, kasih sayang, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
9. Memberikan pendidikan dan perawatan: Pengangkatan anak memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, perawatan kesehatan yang baik, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang mungkin tidak tersedia bagi mereka dalam keadaan terlantar.
10. Mendidik anak dalam ajaran islam: Orang tua angkat bertanggung jawab untuk mendidik anak angkatnya dalam ajaran Islam, mengajarkan nilai-nilai moral, dan membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
11. Memenuhi kebutuhan psikologis: Anak yang terlantar seringkali mengalami trauma dan kesulitan psikologis. Pengangkatan anak memberikan mereka rasa aman, stabilitas, dan kasih sayang yang dapat membantu mereka mengatasi trauma serta membangun kepercayaan diri.
12. Meningkatkan kualitas hidup: Dengan mendapatkan tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan yang baik, pengangkatan anak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan.
13. Menjalankan kewajiban sosial: Dalam Islam, membantu orang yang membutuhkan, termasuk anak-anak terlantar, adalah kewajiban sosial yang dianjurkan. Pengangkatan anak merupakan salah satu cara untuk menjalankan kewajiban sosial ini.

Seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan-ketentuan ini, hukum Islam tidak memiliki peraturan khusus tentang syarat-syarat pengangkatan anak. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak adalah salah satu undang-undang yang berlaku di Indonesia. Peraturan Pemerintah, khususnya Pasal 12 dan 13, mengatur persyaratan pengangkatan anak: [[28]](#footnote-28)

Usia anak angkat yang dimaksud dalam ayat 1 mencakup:

1. Preferensi diberikan kepada anak dibawah usia 6 tahun.
2. Anak-anak antara usia 6 dan 12 tahun, hanya untuk alasan yang mendesak.
3. Anak-anak berusia 12 hingga di bawah 18 tahun, hanya dalam kasus di mana perlindungan khusus diperlukan.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sehat fisik dan mental.
2. Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun.
3. Memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat.
4. Berperilaku baik dan tidak pernah dihukum karena tindak kejahatan.
5. Sudah menikah minimal 5 tahun.
6. bukan pasangan sesama jenis.
7. Memiliki anak, tidak memiliki anak, atau hanya memiliki satu anak.
8. Memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang stabil.
9. Mendapat persetujuan dari anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak tersebut.

Berbagai penjelasan yang telah disampaikan dengan tegas menunjukan bahwa tujuan pengangkatan anak menurut hukum islam adalah untuk melindungi anak dari kehidupan yang terlantar atau kesulitan dalam proses tumbuh kembangnya.[[29]](#footnote-29) Pengangkatan anak semakin dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan anak, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak.[[30]](#footnote-30)

1. **Tujuan Pengangkatan Anak**

Berdasarkan alasan di atas, tujuan konsep adopsi menurut hukum Islam adalah untuk melindungi anak-anak dari pelecehan atau penderitaan selama mereka tumbuh dan berkembang. Islam menganjurkan pemeluknya untuk saling mendukung satu sama lain; Umat ​​Islam dituntut untuk memiliki kesadaran sosial, merawat anak-anak terlantar, dan memberikan nafkah kepada anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Orang kaya mempunyai kewajiban untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari sudut pandang moral dan sosial, pengangkatan anak dianggap sebagai tindakan yang sangat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. khususnya bagi mereka yang mengangkat anak dengan tujuan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang tidak terbagi selama mereka dibesarkan.

Mereka yang sudah memiliki anak namun ingin menambah anggota keluarga dapat melakukannya dengan cara mengangkat anak agar menjadi bagian dari keluarga sebagai anak kandung. Sebaiknya, niat pengangkatan anak ini dilakukan dengan tulus hanya karena Allah SWT. Hal ini sangat penting, mengingat sebagian besar anak angkat berasal dari keluarga miskin, dan banyak di antara mereka yang dibunuh oleh orang tuanya atau ditinggalkan tanpa perawatan, terutama karena kondisi disabilitas yang mereka alami.[[31]](#footnote-31)

Adopsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan setiap orang tua angkat memiliki tujuan tertentu. Pasangan tanpa anak biasanya adalah pasangan yang mengadopsi anak. Adopsi banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memberikan anak yang akan disayangi dan dirawat seumur hidupnya.[[32]](#footnote-32)

Anak angkat tetap memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya setelah pengangkatan. Untuk menjamin keselamatan dan perlindungan anak, pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat lokal. Menurut hukum Islam, tujuan adopsi adalah untuk menjamin pengasuhan dan pertumbuhan anak, bukan untuk meneruskan garis keluarga.[[33]](#footnote-33)

Mengadopsi anak memiliki dua tujuan, yaitu melindungi mereka dari kehidupan yang terabaikan dan mendidik mereka untuk menjadi orang dewasa yang berharga di masa depan. Adoption biasanya dilakukan dengan tujuan mengurangi tanggung jawab orang tua kandung, tetapi juga sering dilakukan dengan tujuan meneruskan keturunan, terutama bagi pasangan yang belum memiliki anak. Di banyak daerah, seperti di Jawa, adopsi juga lazim dianggap sebagai cara memperoleh keturunan biologis sendiri.[[34]](#footnote-34)

Menurut hukum Islam, tujuan utama adopsi adalah untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak-anak terlantar atau terlantar sekaligus memastikan bahwa mereka berkembang biak dan sehat dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai Islam tentang kebaikan, kepedulian, dan kewajiban sipil. Dalam Islam, pengangkatan anak dilakukan untuk beberapa alasan berikut:

1. Anak-anak yang terlantar, yatim piatu, atau ditelantarkan oleh orang tuanya sangat rentan terhadap banyak tantangan. Adopsi memberi mereka perlindungan, cinta, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Menawarkan perawatan dan pendidikan: Adopsi memberi anak-anak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tepat, perhatian medis yang berkualitas, dan kebutuhan lain yang mungkin tidak dapat mereka akses ketika mereka diabaikan.
3. Mengajarkan prinsip-prinsip Islam kepada anak-anak: Adalah tugas orang tua angkat untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam kepada anak angkatnya, menanamkan prinsip-prinsip moral dalam diri mereka, dan membantu mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang bermoral tinggi.
4. Mendidik anak dalam ajaran islam: Orang tua angkat bertanggung jawab untuk mendidik anak angkatnya dalam ajaran Islam, mengajarkan nilai-nilai moral, dan membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
5. Memenuhi kebutuhan psikologis: Anak yang terlantar sering kali mengalami trauma dan kesulitan psikologis. Pengangkatan anak memberikan mereka rasa aman, stabilitas, dan kasih sayang yang dapat membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kepercayaan diri
6. Meningkatkan kualitas hidup: Dengan mendapatkan tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan yang baik, pengangkatan anak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan.
7. Melaksanakan kewajiban sosial: Dalam Islam, membantu mereka yang membutuhkan, termasuk anak-anak yang terlantar, adalah kewajiban sosial yang sangat dianjurkan. Pengangkatan anak menjadi salah satu cara untuk memenuhi kewajiban sosial tersebut.

Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak [[35]](#footnote-35), Tujuan pengangkatan anak adalah untuk melindungi kesejahteraan anak dan dilihat dari sudut pandang kepentingan terbaik anak. Pengangkatan anak juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kehidupan dan masa depan anak angkat.[[36]](#footnote-36)

### **Akibat Hukum pengangkatan Anak**

Nasab atau hubungan darah anak angkat tetap terpelihara; hal itu tidak meniadakan hubungan darah orang tua kandung anak tersebut.

1. Perwalian.

Orang tua angkat dapat menjadi wali anak angkat setelah menerima keputusan pengadilan. Setelah keputusan ini dibuat, orang tua angkat akan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang tua biologis mereka. Namun, jika anak angkat perempuan beragama islam ingin menikah, hanya orang tua kandung atau sodara sedarah, yang juga disebut sebagai wali nasab, yang boleh melakukannya. Hukum Islam melarang orang tua perempuan anak angkat untuk menjadi wali nikahnya.

1. Waris.

Hak waris diatur oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Akibatnya, seseorang memiliki kemungkinan untuk memilih undang-undang mana yang akan berlaku untuk menentukan apa yang akan diwariskan kepada anak angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan darah, wali-mewali, atau hak waris antara orang tua angkat dan anak angkat. Anak angkat menggunakan nama ayah kandungnya dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Warisan dalam hukum Islam didasarkan pada ikatan darah atau arham. Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya berhak atas wasiat wajib sebesar tidak lebih dari sepertiga harta orang tua angkatnya.[[37]](#footnote-37)

## **Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris**

### **Pengertian waris**

Harta warisan merupakan bagian dari kekayaan seseorang. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, pertanyaannya adalah siapa yang berhak atas harta tersebut. Warisan diberikan kepada para ahli waris setelah pewaris atau pewaris meninggal dunia. Warisan ini tidak berasal dari perjanjian; itu berasal dari hukum masyarakat yang berlaku. Pemahaman kita tentang hukum waris akan ditingkatkan dengan mempelajari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada keturunannya.

Para ahli telah mengemukakan berbagai pendapat mengenai pengertian hukum waris Islam, seperti berikut ini:

1. Dr. Muslich Marzuki mengatakan dalam bukunya "Prinsip-prinsip Ilmu Waris" bahwa ilmu waris adalah bidang yang mempelajari bagaimana hak dan kewajiban orang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada orang lain yang masih hidup.[[38]](#footnote-38)
2. Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, dalam bukunya Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits, menyatakan bahwa hak waris mencakup harta yang masih hidup, baik itu harta benda, tanah, atau hak syariah. [[39]](#footnote-39)

### **Dasar Hukum Pewarisan Islam**

1. Al-Qur'an adalah sumber utama hukum pewaris islam, bersama dengan sunnah Rasul dan Ijtihad. Al-Qur’an memberikan petunjuk yang cukup rinci tentang hukum pewarisan islam. Hukum kewarisan islam ditemukan dalam hampir semua ayat surat An-nisa, dan sebagian kecil surat lain.
2. **Surah An-Nisaa (4): 7** yang artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*
3. Surah An-Nisaa (4): 8 yang artinya: *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*
4. Surah An-Nisaa (4): 11 yang artinya: *"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."*
5. Surah An-Nisaa (4): 33 yang artinya: *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."*
6. Sunnah Rasul

Dalam diskusi ini, Sunnah disebut sebagai "*Tradisi Nabi*" jika dimaksudkan sebagai praktik normatif atau contoh tindakan yang dicontohkan oleh Rasul Allah. Sunnah juga berfungsi sebagai interpreter atau panduan khusus untuk Al-Qur'an, dan Hadith pada akhirnya dapat menghasilkan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an.[[40]](#footnote-40)

Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas berkata, "Mereka akan memberikannya kepada ahli waris yang berhak, dan jika ada yang tersisa, mereka akan memberikannya kepada kerabat laki-laki terdekatnya."

1. Ijtihad

Perubahan konstan dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam, membuat *ijtihad* berfungsi sebagai dasar hukum alternatif. Para ahli hukum dibutuhkan untuk menetapkan hukum bagi masalah yang baru muncul, karena masalah tersebut belum pernah terjadi pada zaman Nabi. *Ijtihad* dalam eksplorasi hukum dapat didefinisikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum bagi suatu masalah baru dengan mempertimbangkan dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadits.[[41]](#footnote-41)

### **Asas Kewarisan Dalam Hukum Islam**

1. Asas ijbari, khususnya menetapkan cara peralihan harta warisan diberikan kepada ahli waris, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 187 Ayat (2), yang berbunyi: "Sisa pengeluaran di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak."
2. Asas bilateral yang disebutkan dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai "pengelompokan para ahli waris", yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan). Oleh karena itu, kedua kelompok tersebut sudah pasti menganut prinsip bilateral.
3. Asas individu, yang ditunjukkan dalam Pasal-Pasal dari Pasal 176 hingga 180 tentang jumlah bagian yang diberikan kepada ahli waris.
4. Asas keadilan berimbang ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam pasal-pasal seperti Pasal 176 dan 180 yang mengatur besarnya bagian warisan. Asas ini juga berlaku untuk perubahan dalam pembagian kekayaan, seperti cara pembagian "aul dan radd". Selain itu, konsep perang pengganti, yang disebutkan dalam Pasal 185, juga termasuk dalam keadilan berimbang.[[42]](#footnote-42)

### **Rukun Waris**

Rukun waris terdiri dari dua hal:

1. Harta Warisan (*Mauruts atau Tirkah*)

Harta warisan adalah aset yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diwariskan kepada ahli waris setelah digunakan untuk membayar hutang, memenuhi wasiat, dan kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan hukum. Istilah "tirkah" mengacu pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat diwarisi oleh ahli waris secara hukum. Definisi barang-barang tersebut perlu dirumuskan secara luas agar mencakup berbagai jenis aset yang relevan:[[43]](#footnote-43)

1. Barang dan harta benda yang bernilai ekonomi antara lain surat berharga, diyat, piutang ahli waris, harta benda bergerak dan tidak bergerak, serta barang-barang lain yang dinilai.
2. Hak milik: Hak ini mencakup hak tunggal untuk memanfaatkan sumber daya seperti persediaan air minum dan jalan raya umum.
3. Benda-benda milik pihak lain: Ini mencakup barang yang digadaikan serta barang yang telah dibeli oleh pihak lain namun belum diserahkan kepada almarhum.
4. Hak yang bersifat non-materiil: Contohnya adalah hak *syuf’ah,* yaitu hak tetangga untuk membeli barang yang dihibahkan atau dihibahkan.
5. Pewaris (*Mauruts*)

Seseorang yang meninggal, baik secara nyata maupun berdasarkan keputusan hukum. Kematian hukum adalah kematian yang diputuskan oleh hakim karena alasan tertentu, meskipun orang tersebut sebenarnya belum meninggal. Ahli waris adalah seseorang yang meninggalkan warisan dan warisan setelah meninggal dunia, menurut Kompilasi Hukum Islam.[[44]](#footnote-44)

1. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang Islam yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai ikatan keluarga atau perkawinan dengan ahli waris. Adapun syarat-syarat untuk menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, seperti anak biologis atau orang tua dari pewaris.
2. Memiliki ikatan perkawinan dengan pewaris, seperti suami atau istri.
3. Tidak terhalang untuk menerima warisan, misalnya karena tindakan seperti membunuh pewaris.

Proses pewarisan tidak dapat dilakukan jika salah satu dari tiga syarat ahli waris diatas tidak terpenuhi. Jika seseorang meninggal dunia tanpa ahli waris, harta warisan akan dialihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Penyebab Warisan**

Terdapat empat jenis alasan mengapa seseorang dapat mewarisi. Namun, ada situasi tertentu di mana dua jenis ini dapat digunakan, tergantung pada waktu dan tempat. Faktor-faktor penyebab warisan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Karena ada hubungan kekerabatan

Kekerabatan sejati (haqiqi) dan kekerabatan sah (hukmi), seperti yang timbul dari emansipasi budak, merupakan dua kategori kekerabatan. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Anfal (8): 75, yang artinya: *"Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

1. Hubungan perkawinan

Firman Allah SWT Pada Surah An-Nisaa (4) :12,yang artinya: *"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun."*

1. Hubungan Wala

Tindakan pembebasan budak menciptakan kekerabatan yang sah sesuai syariat. Meskipun tidak berlaku sebaliknya, namun orang yang membebaskannya berhak mewarisi harta milik orang lain. Dengan kata lain, orang yang merdeka tidak berhak mewarisi harta milik orang yang membebaskannya.[[45]](#footnote-45)

1. Hubungan agama

Seseorang dikatakan beragama Islam menurut Kompilasi Hukum Islam apabila hal itu dapat dibuktikan dengan kartu identitas, akidah keagamaan, atau keterangan orang lain. Bayi dan anak kecil mengikuti agama ayahnya atau agama lingkungannya. Warisan Nabi Muhammad SAW wajib diberikan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Islam apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris.[[46]](#footnote-46)

### **Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat**

Pengacara Inkuisisi secara konsisten menetapkan aturan tetap dalam sistem Inkuisisi yang mengakui hak anak angkat untuk menerima bagian melalui mekanisme wasiat wajib. Dalam praktik di Pengadilan Agama, permasalahan terkait wasiat wajib sering kali menjadi sumber sengketa dalam kasus pembagian warisan.

Wasiat wajib adalah wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabatnya yang tidak berhak mewarisi dari mereka karena aturan syariah. Sepanjang bagiannya sama dengan apa yang diperoleh Ashabul Furud sebagai ahli waris seandainya masih mempunyai hak waris, maka wasiat ini terbatas pada jumlah harta seluruhnya.

Istilah *“al-khair”* dalam surat Al-Baqarah (2): 180 yang berhubungan dengan wasiat diartikan sebagai berikut: *"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Surat wasiat wajib adalah keputusan yang diambil oleh pejabat negara, seperti penguasa atau hakim, mengenai tanggung jawab wasiat orang yang meninggal kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Alasan mengapa hal ini diperlukan adalah karena:

1. Tidak ada unsur kehendak bebas dari pihak pemberi wasiat, digantikan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang atau putusan pengadilan.
2. Ada kesamaan dengan aturan pembagian harta warisan, di mana bagian yang diterima oleh laki-laki adalah dua kali lipat bagian yang diterima oleh perempuan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat diwajibkan untuk memberikan wasiat wajib kepada anak angkatnya demi kemaslahatannya, sesuai dengan tanggung jawab mereka untuk memenuhi semua kebutuhan anak angkat.[[47]](#footnote-47)

Menurut Pasal 209 KHI, ayat 1 dan 2, wasiat wajib yang disebutkan dalam KHI adalah wasiat yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika pihak yang bersangkutan belum memberikan wasiat sebelumnya. Maksimal sepertiga dari harta warisan dapat ditinggalkan dalam wasiat.[[48]](#footnote-48)

Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban terbatas untuk menghidupi anak-anaknya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mencapai usia dewasa. Setelah usia tersebut, anak-anak terutama yang sudah berkeluarga harus mencari nafkah karena orang tua sudah tidak lagi bertugas mengasuh mereka. Namun, biaya pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan anak angkat dapat diperpanjang hingga mereka menikah atau mencapai usia 21 tahun, dengan tujuan baik untuk merawat, melindungi, dan mendidik anak angkat. Hal ini menumbuhkan kesadaran konstruktif bahwa orang tua harus menjaga anak hingga mampu hidup mandiri.

Praktik pengangkatan anak di Indonesia, dalam konteks ini, mirip dengan tradisi masyarakat Jahiliyah Arab, di mana anak angkat diperlakukan seperti anak kandung. Anak angkat memiliki hak wasiat wajib atas harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan logika hukum. Menurut keputusan Pengadilan Negeri, meskipun semua pihak beragama Islam, anak angkat tetap diperlakukan setara dengan anak kandung sesuai dengan hukum adat. Dalam situasi seperti ini, ada "titik sentuh" yang terus-menerus antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama saat menyelesaikan perselisihan waris antara anak angkat dan pengadilan negeri. [[49]](#footnote-49)

## **Tinjauan Umum tentang Hakim**

### **Pengertian Hakim**

### Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Suatu perkara diputuskan oleh hakim di pengadilan atau Mahkamah Agung. Dalam bahasa Arab, istilah "hakima" berasal dari kata yang berarti "peraturan, hukum, kekuasaan, atau pemerintahan." Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa:[[50]](#footnote-50)

*Hakim tidak hanya menjadi hakim di Mahkamah Agung tetapi juga menjadi hakim di lembaga peradilan yang berada di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus yang termasuk dalam lingkup peradilan tersebut.*

Hakim adalah penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi undang-undang untuk memimpin persidangan, mengadili, dan memutuskan perkara.

### **Tugas Dan Kewenangan Hakim**

Hakim pada dasarnya adalah pihak yang memastikan penerapan hukum Indonesia untuk mencapai keadilan, sehingga pelaku kesalahan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Hakim tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, atau memutuskan suatu perkara selama menjalankan fungsinya. Karena hakim dianggap sebagai pihak yang paham hukum, hakim tidak boleh menolak suatu perkara hanya karena tidak ada aturan hukum yang mengaturnya atau undang-undangnya ambigu *(curialus novit*). Hakim juga harus selalu berpegang pada asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Hakim wajib mengadili suatu perkara berdasarkan pemahaman hukum yang dimilikinya. Jika hukum suatu perkara tidak jelas, hakim harus menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Mereka harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku, mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dan mempertimbangkan seberapa berat tindak pidana itu berdasarkan seberapa baik terdakwa. Hal ini sesuai dengan prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", serta prinsip penerapan keadilan dan hukum yang didasarkan pada Pancasila.

Hakim harus mengacu pada surat pelimpahan perkara yang memuat semua dakwaan dan kesalahan terdakwa ketika menjatuhkan hukuman. Keputusan hakim mengenai apakah tersangka bersalah atau tidak bergantung pada hasil pembuktian yang terungkap selama pemeriksaan dan persidangan. Hal ini tercermin dalam proses persidangan yang sering kali memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan hingga satu tahun untuk menyelesaikan satu perkara. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi, barang bukti, pernyataan terdakwa atau ahli, dan peristiwa yang terjadi selama persidangan sebelum membuat keputusan.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, hakim diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili perkara. [[51]](#footnote-51)

1. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim "berwajib menjaga independensi lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya."
2. Pasal 4 dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan:
3. Hakim harus menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan situasi khusus seseorang.
4. Membantu mereka yang mencari keadilan dan berupaya memberikan solusi yang sederhana, cepat, dan ekonomis terhadap segala hambatan terhadap keadilan.
5. Membantu mereka yang memperjuangkan keadilan dan berusaha untuk menyediakan solusi praktis, cepat, dan hemat biaya untuk segala hambatan yang menghalangi keadilan.
6. Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
7. Hakim dan hakim konstitusi bertanggung jawab untuk mempelajari, mempertahankan, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.
8. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki kualitas seperti kejujuran, keadilan, profesionalisme, pengalaman hukum, integritas, dan akhlak.
9. Hakim, termasuk hakim konstitusi, harus mematuhi Kode Etik dan Perilaku Peradilan.
10. Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, "Hakim wajib mempertimbangkan baik buruknya sifat terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana."
11. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan Kehakiman, dijelaskan tanggung jawab hakim sebagai berikut:
12. Hakim yang mengadili perkara dapat diajukan banding oleh salah satu pihak yang sedang bersengketa.
13. Seseorang yang sedang menunggu prosedur hukum berhak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan keberatan yang wajar kepada hakim yang mengadili perkara tersebut.
14. Seorang hakim harus mengundurkan diri dari jabatannya jika dia memiliki hubungan darah dengan ketua, hakim lain, penuntut umum, advokat, atau panitera. Ini termasuk hubungan suami-istri meskipun telah bercerai. peradilan.
15. Ketua majelis, hakim, penuntut umum, atau panitera harus mengundurkan diri jika ada hubungan darah, termasuk perkawinan sampai derajat ketiga, atau hubungan darah dengan pihak lain. Ini berlaku bagi mereka yang terlibat dalam kasus tersebut. Persidangan akan dilanjutkan oleh seorang pengacara atau pengganti.
16. Hakim, panitera, atau penggugat yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang sedang dibicarakan dapat mengundurkan diri dari persidangan atas permintaan mereka sendiri.
17. Putusan yang dibuat dianggap tidak sah jika ketentuan pada ayat (5) dilanggar, dan hakim atau panitera yang mengambil putusan dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
18. Majelis hakim yang baru harus memeriksa kembali perkara sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) dan (6).

Sejalan dengan tugas dan kewenangan hakim yang telah disebutkan, yaitu kemampuan hakim dalam membuat putusan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka berdasarkan hal tersebut, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, tanpa adanya paksaan atau intervensi dari pihak manapun.

1. **Pengertian Pengadilan**

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan hukum untuk menegakkan keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia memastikan bahwa pengadilan dapat memberikan keadilan kepada warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan peninjauan kembali. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki peran dalam mengkaji peraturan perundang-undangan di tingkat legislatif. Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua cabang peradilan. Mahkamah Agung membawahi empat cabang peradilan administrasi, militer, agama, dan peradilan umum sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

1. Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengatur tentang Peradilan Umum. Ia memiliki kekuasaan untuk menyelidiki, mengadili, dan memutuskan kasus pidana dan perdata sesuai dengan hukum. Anggota mahkamah agung adalah:

* Pengadilan Negeri adalah lembaga hukum. Letaknya di ibu kota kota atau wilayah dan bertanggung jawab atas wilayah tersebut.
* Pengadilan Tinggi: Pengadilan Banding berada di ibu kota negara bagian dan bertanggung jawab atas seluruh negara bagian.

1. Peradilan Agama

Pengadilan agama berwenang mengadili, memutus, dan menyelesaikan perselisihan perdata umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berikut beberapa pengadilan yang termasuk dalam kategori peradilan agama:

* Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding yang mempunyai kewenangan di seluruh provinsi.
* Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

1. Peradilan Militer

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memiliki wewenang untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara pidana atau sengketa administrasi militer sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan yang termasuk dalam peradilan militer meliputi: [[52]](#footnote-52)

* Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama dalam kasus pidana dimana terdakwa adalah kapten atau lebih rendah.
* Mahkamah Agung Militer: dalam kasus pidana di mana terdakwanya berpangkat mayor atau lebih tinggi, ini adalah pengadilan banding untuk pengadilan militer dan pengadilan tingkat pertama. Ini juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk sengketa antara militer dan administrasi.
* Pengadilan Militer Utama: Keputusan Mahkamah Agung militer diputuskan oleh pengadilan tinggi. Pengadilan militer memiliki yuridiksi di seluruh indonesia, dengan markas utamanya di ibu kota.
* Pengadilan Tempur Militer: Pengadilan ini didirikan di daerah petempuran dan mengawasi pergerakan pasukan. Pengadilan militer tempur adalah pengadilan pertama dan terakhir untuk kasus pidana yang diajukan oleh anggota militer.

1. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peruabahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, menentukan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan undang-undang:

* Pengadilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tingkat Pertama berlokasi di ibu kota kota atau kabupaten, dan wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah kota atau kabupaten.
* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat banding ini berkantor di ibu kota provinsi dan memiliki daerah hukum yang mencakup wilayah provinsi.

1. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan pertama dan terakhir. Perkara yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan organ negara, lembaga politik untuk kepentingan umum, atau sengketa pemilu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

### **Pengertian Putusan Pengadilan**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 189 RBg *(Rechtsreglement Buitengewesten*), Majelis Hakim harus bersidang untuk memutus perkara setelah pemeriksaan selesai, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Musyawarah hanya dapat dilakukan setelah seluruh proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak boleh dilakukan pada awal persidangan. Setelah terdakwa memberikan jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 121 HIR dan Pasal 113 Rv *(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering),* pemeriksaan dianggap selesai. Selanjutnya, proses berlanjut ke tahap pembuktian dan penyampaian kesimpulan, diikuti dengan duplikat tergugat dan penggugat sesuai dengan Pasal 115 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*). Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan berakhir setelah seluruh tahapan tersebut selesai. Setelah itu, putusan dijatuhkan atau diucapkan. Sebelum keputusan diumumkan, Majelis Hakim mempertimbangkan hasil-hasil yang akan dikomunikasikan kepada para pihak yang berperkara.[[53]](#footnote-53)

Keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang dibuat di tingkat peradilan pertama. Tujuan utama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah untuk membuat keputusan yang menyelesaikan perkara. Berdasarkan keputusan tersebut, hak-hak dan hubungan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat didefinisikan dengan jelas. Dalam hal ini, ada sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan. Hakim akan membuat keputusan setelah proses pemeriksaan perkara selesai, yang mencakup jawaban penggugat, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian dari kedua belah pihak, dan tidak ada lagi pihak yang ingin berbicara.[[54]](#footnote-54)

### **Asas Putusan Hakim**

### Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (sebelumnya tercantum dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman) memberikan dasar yang harus diikuti agar keputusan dapat dibuat dengan benar.[[55]](#footnote-55) Asas-asas ini berupa :

### kewajiban mengadili seluruh bagian gugatan, yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.

### Tidak boleh menerima tuntutan lebih dari yang disebutkan diatas.

### Diucapkan secara umum.

### **Pengertian Pertimbangan Hakim**.

Pertimbangan hakim merupakan unsur kunci dalam tercapainya nilai keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan secara hati-hati, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[[56]](#footnote-56)

Pembuktian dalam suatu perkara sangat penting karena hasilnya digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut. Pembuktian digunakan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil dan tepat. Hakim tidak dapat memutuskan perkara sebelum mereka memastikan bahwa fakta-fakta tersebut benar-benar terbukti, yang menunjukkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa.[[57]](#footnote-57) Pertimbangan hakim seharusnya mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Keprihatinan, permasalahan, dan argumen utama yang diterima atau tidak dibantah.
2. Semua fakta yang ditemukan selama persidangan dimasukkan dalam analisis hukum putusan.
3. Agar hakim dapat menentukan terbukti atau tidaknya tuntutan itu dan dapat dikabulkannya dalam putusan, maka setiap unsur petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili satu per satu.[[58]](#footnote-58)

### **Dasar Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan titik puncak dari proses pemeriksaan dan pengadilan yang dilakukan oleh seorang hakim. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesimpulan tentang keadaan kejadian, termasuk apakah terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran yang dituduhkan.
2. Penentuan status hukum terdakwa, apakah perbuatannya termasuk kejahatan, dan apakah ia terbukti cukup bersalah untuk menerima hukuman.
3. Tergantung pada jenis pelanggarannya, pelanggar bisa mendapatkan hukuman jika terbukti bersalah.[[59]](#footnote-59)

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, diadili, dan/atau diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," kata Pasal 8 Ayat (1). harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan.” dibuat dan dinyatakan salah serta memperoleh kekuatan hukum tetap.” Hanya ketika keputusan pengadilan diumumkan di depan umum barulah keputusan tersebut mempunyai kekuatan dan keabsahan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dua tanggung jawab utama hakim dalam mengadili perkara adalah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim diharuskan melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak, tanpa bias atau campur tangan. Sejumlah undang-undang, seperti Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa keadilan harus ditegakkan secara mandiri demi menjaga hukum dan keadilan, juga melindungi hak tersebut. Faktor-faktor berikut ini diperhatikan oleh hakim ketika mengambil keputusan:

1. Pertimbangan yuridis, misalnya hukum dan teori yang berkaitan dengan perkara atau persoalan tertentu.
2. Unsur non-yuridis, seperti keyakinan moral dan kodrat hakim.

Memberikan keputusan adalah tugas utama seorang hakim. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif dalam persidangan pidana, juga dikenal sebagai sistem pembuktian negatif. Pada dasarnya, sistem ini menetapkan bahwa suatu peristiwa, hak, atau kesalahan dianggap terbukti berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh integritas moral yang tinggi, bukan hanya alat bukti undang-undang.

1. Yure Humano, Tinjauan Yuridis Terkait Hak Waris Anak Angkat Menurut KHI ( Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPerdata ( studi komparasi), *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 7, no 1, 2023, hlm 38 <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/about#:~:text=Yure%20Humano%20merupakan%20Jurnal%20Ilmu,Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Mpu%20Tantular>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Jakarta: Aka Press, 1991, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktu, vol. 14, No. 2, Desember 2016, hlm. 183-184 <file:///C:/Users/user/Downloads/232-Article%20Text-289-1-10-20171116.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Haedah Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal Dinamika Hukum, 2009, vol. 9, hlm. 154 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/223/0> [↑](#footnote-ref-5)
6. Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Halim, Hukum Keluarga di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm.123. [↑](#footnote-ref-7)
8. Enis Tristiana dan Francisca Vani Dwikowati, Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten, 2023, hlm. 92 <file:///C:/Users/user/Downloads/_+Artikel+5+~+(1)%20(5).pdf> [↑](#footnote-ref-8)
9. Miftahul Aini, Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg), Indonesian Notary, vol. 2, 2020.<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1349&context=notary> [↑](#footnote-ref-9)
10. Mukhtar Asrori, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah: Studi Kasus Di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017) <https://etheses.iainponorogo.ac.id/2534/1/MUKHTAR%20ASRORI.pdf> [↑](#footnote-ref-10)
11. Angga Pradipta, Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013) <https://eprints.ums.ac.id/23907/10/02._Naskah_Publikasi.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. Moh. Nazir, Metode Penelitian Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 79. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, cet. 3, hlm. 132. [↑](#footnote-ref-13)
14. **Sugiyono**, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 291. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Majid Husen, Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Bakri, Jakarta: Pustaka Sadra, 2004, hlm. 125, [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Hatta, *Hak Anak dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Penerbit Ilmu, 2010, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-16)
17. Naskah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Anak dan Masa Depan Bangsa*, Jakarta: Penerbit KPAI, 2015, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-17)
18. B. Bastian Taffal, *Common Law Adopsi dan Akibat Hukumnya di Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2015, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zaini, Muderis, Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm 6. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid 149 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171* [↑](#footnote-ref-21)
22. Musthofa Sy, Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa,* Mesir: Dar al-Syuruq, 1980, hlm. 359, 1980 [↑](#footnote-ref-23)
24. Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV Mandar Maju, 2009, hlm. 177. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* hlm.183 [↑](#footnote-ref-25)
26. Andi Sri Rezky Wulandari, Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*,* *Cahaya Keadilan*, Vol. 2, No. 6. [Https://Www.Researchgate.Net/Publication/331796021\_Studi\_Komparatif\_Pembagian\_Harta\_Warisan\_Terhadap\_Anak\_Angkat\_Menurut\_Kompilasi\_Hukum\_Islam\_Dan\_Hukum](https://www.researchgate.net/publication/331796021_STUDI_KOMPARATIF_PEMBAGIAN_HARTA_WARISAN_TERHADAP_ANAK_ANGKAT_MENURUT_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM_DAN_HUKUM) [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhammad Al-Munir, *Hukum Keluarga Islam dan Pengangkatan Anak*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2015, hlm. 112-115. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak* [↑](#footnote-ref-28)
29. Moh. Nashiruddin Amin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak dan Pembagian Harta Warisnya,” *Ummul Qura*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 24. <file:///C:/Users/user/Downloads/217-Article%20Text-272-1-10-20230101.pdf> [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid* hlm 26 [↑](#footnote-ref-30)
31. Muderis Zaini, Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-3, 1999, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-31)
32. Zakia Al Farhani, Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam*,* *Skripsi,* Jakarta: Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 24-25. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3002/1/ZAKIA%20AL%20FARHANI-FSH.pdf> [↑](#footnote-ref-32)
33. Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-33)
34. Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 253. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak* [↑](#footnote-ref-35)
36. Rusli Pandika, Op. Cit., hlm. 106. [↑](#footnote-ref-36)
37. Abidin, Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam, USM Law Review, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 26 <https://www.researchgate.net/publication/341427947_Rekonseptualisasi_Akibat_Hukum_Pengangkatan_Anak_Menurut_Kajian_Kompilasi_Hukum_Islam> [↑](#footnote-ref-37)
38. Muslich Marzuki, Pokok-Pokok Ilmu Waris (Jakarta: Penerbit Hukum, 2012), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-38)
39. Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadits. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 1995 [↑](#footnote-ref-39)
40. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 11-13. [↑](#footnote-ref-40)
41. Muhammad S. Al-Bukhari, *Fikih Ijtihad dalam Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Ilmu, 2015, hlm. 45-47. [↑](#footnote-ref-41)
42. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174, Pasal 176-180, Pasal 185. [↑](#footnote-ref-42)
43. Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-43)
44. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171. [↑](#footnote-ref-44)
45. Husni A. Jalil, Monica Inmai, Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI Pasal 173 Huruf A, El-Usrah, Vol. 2, No. 2, Desember, 2019, hlm. 261. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7658/4584> [↑](#footnote-ref-45)
46. Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-46)
47. Musthofa Sy, Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 131-132. [↑](#footnote-ref-47)
48. Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-48)
49. ***Ibid* hlm 158** [↑](#footnote-ref-49)
50. **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman* [↑](#footnote-ref-51)
52. *Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer* [↑](#footnote-ref-52)
53. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 797. [↑](#footnote-ref-53)
54. Moh. Taufik Makaro, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. [↑](#footnote-ref-54)
55. Opcit, *Hukum Acara Perdata*, hlm 797. [↑](#footnote-ref-55)
56. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. 5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid*, hlm 141 [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid*, hlm 142 [↑](#footnote-ref-58)
59. Sodarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 74. [↑](#footnote-ref-59)